



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran dari Pola Dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sangat strategis yang berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga tercipta suatu sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Oleh karenanya, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan dan Desa Kota Denpasar akan dipakai sebagai pedoman oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan dan Desa Kota Denpasar dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Denpasar yang dijabarkan dalam visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Semoga Perubahan Renstra ini dapat berfungsi sebagai pedoman perencanaan di dalam pemberdayaan masyarakat dan desa dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Denpasar



I Wayan Budha, S.IP., M.A.P

Pembina Tk.I

NIP. 197007151992011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB IPENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD Kota Denpasar	11
2.2 Sumber Daya DPMD Kota Denpasar	13
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD Kota Denpasar.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD Kota Denpasar	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..	28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kota Denpasar.....	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....	37
5.1 Strategi DPMD Kota Denpasar.....	37
5.2 Arah Kebijakan DPMD Kota Denpasar.....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
7.1 Indikator Kinerja DPMD Kota Denpasar	58
BAB VIII PENUTUP	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antara Renstra DPMD Kota Denpasar 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya.....	6
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	12
Gambar 2. 2 Jumlah Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Per 31 Desember 2020	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	133
Tabel 2. 2 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin.....	13
Tabel 2. 3 Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	14
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak) berdasarkan Uraian Tugas.....	14
Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS (Tenaga Kontrak) berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	17
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2017-2020	18
Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2021	25
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.....	36
Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	39
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022	41
Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2023-2026	47
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	60
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 903/628/BAPPEDA/2022 perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; penyesuaian nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana termuat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; penyesuaian kelembagaan sebagaimana dimuat pada Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka disusunlah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra berpedoman pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis DPMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021 dan memberikan arah (*road map*) untuk mencapai Visi dan Misi Walikota Denpasar sesuai dengan Padmaksara serta dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan Perubahan Renstra DPMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan bidang pemberdayaan masyarakat selama 5 tahun dari Tahun 2021-2026;
2. Menjadi acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah;
3. Untuk memperbaiki ulang tolok ukur dan alat bantu bagi Dinas untuk secara konsekuen dan konsisten mengukur kinerja Dinas dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan prima.

Sedangkan tujuan dari Perubahan Renstra DPMD Kota Denpasar adalah untuk lebih memantapkan terselenggarakannya kegiatan dengan mengutamakan Skala Prioritas dalam upaya mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Jika dijabarkan, tujuan Renstra DPMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kejujuran dan spirit sewaka dharma sebagai penguat reformasi dan birokrasi untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwibawa;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran DPMD Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mewujudkan visi, misi Pemerintah Kota Denpasar yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan identifikasi permasalahan, Telaah visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, Renstra Provinsi Bali serta Renstra Kementerian Desa, kemudian penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Walikota terpilih dalam program serta tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategis dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, serta simpulan Renstra Perangkat Daerah.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mengemban tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terdiri atas :

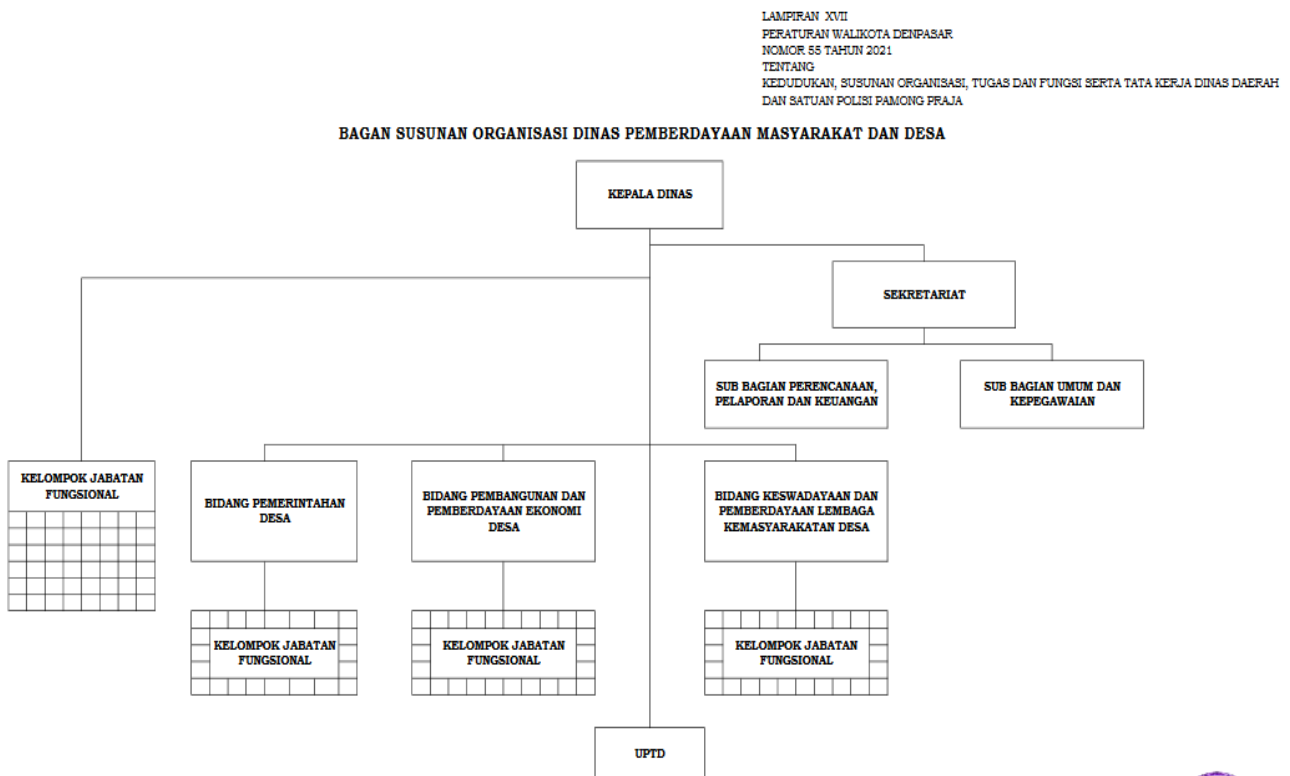
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Bidang Pemerintahan Desa;
Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa;
Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun wewenang/ruang lingkup tugas dan beban kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme penyelenggara tugas, fungsi dan kewajiban Pemberdayaan.

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa serta pemberdayaan, fasilitasi kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Masyarakat dan desa pada umumnya menjadi satuan terdepan dalam penanganan dampak pandemic covid-19 di Kota Denpasar, diantaranya sosialisasi protocol kesehatan baru kepada satgas desa atau kelurahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat diwilayahnya masing-masing, menginisiasi pembentukan kesepakatan bersama antara kewilayahan desa atau dusun, lingkungan dengan banjar adat di Kota Denpasar, memfasilitasi refocusing penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak covid-19 memonitoring terdistribusinya BLT yang bersumber dari dan desa.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar lebih rinci dalam gambar terlampir.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



2.2 Sumber Daya DPMD Kota Denpasar

2.2.1 Potensi Sumber Daya Aparatur DPMD

Jumlah pegawai negeri sipil yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar berjumlah 30 (tiga puluh) orang dari berbagai latar belakang Jenis Kelamin, Pendidikan, Jenis Jabatan, Tingkat Pendidikan, Golongan dan Uraian Tugas. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Kualifikasi Pendidikan	PNS	Tenaga Kontrak	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
S2	4 orang	2 orang	4	2
S1	16 orang	24 orang	17	23
D1 / D2 / D3 / SarMud	1 orang	1 orang	-	2
SMA / Sederajat	7 orang	17 orang	14	10
Dibawah SMA	2 orang	-	2	-
Total	30 orang	44 orang	37	37

Tabel 2. 2 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	1
3.	Eselon III	2	2	4
4.	Eselon IV	1	1	2
5.	Fungsional	3	2	5
	Jumlah	7	5	12

Tabel 2. 3 Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	2	3	5
2.	Golongan III	8	8	16
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	2	-	2
Jumlah :		16	14	30

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak) berdasarkan Uraian Tugas

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pegawai
		(orang)
1.	Tenaga Administrasi	36
2.	Sopir	2
3.	Penjaga malam	2
5.	Cleaning Service	2
6.	Tukang Kebun	2
Jumlah :		44

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS (Tenaga Kontrak) berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
		(orang)
1.	Laki-Laki	37
2.	Perempuan	37
Jumlah :		76

2.2.2 Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, nilai aset/modal yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar hingga akhir tahun 2020, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 2 Jumlah Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Per 31 Desember 2020



KOTA DENPASAR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2020

Provinsi : BALI
Kab./Kota : KOTA DENPASAR
Bidang : Bidang Sosial
Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	3.171.319.471,84
01	Tanah	0,00
02	Peralatan dan Mesin	3.137.204.471,84
02	Alat-alat Besar	0,00
03	Alat-alat Angkutan	1.563.706.590,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
05	Alat Pertanian	0,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.319.800.251,84
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	253.697.670,00
08	Alat-alat Kedokteran	0,00
09	Alat Laboratorium	0,00
10	Alat-alat Penerjataan/Kearifan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	0,00
11	Bangunan Gedung	0,00
12	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.740.000,00
13	Jalan dan Jembatan	0,00
14	Bangunan Air/Irigasi	0,00
15	Instalasi	0,00
16	Jaringan	24.740.000,00
05	Aset Tetap Lainnya	9.375.000,00
17	Buku dan Perpustakaan	0,00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	9.375.000,00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
20	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	53.625.000,00
07	Aset Lainnya	53.625.000,00
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
24	Aset Tidak Berwujud	53.625.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan DPMD Kota Denpasar

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya. Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu orang/kelompok masyarakat namun tetap dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik belaka namun harus mampu dirasakan secara non fisik/bermanfaat secara berkesinambungan sehingga pembangunan itu tidak mubazir yaitu hanya bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh segelintir masyarakat.

Kinerja pelayanan DPMD untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja DPMD Kota Denpasar yang sudah tertera dalam RPJMD Kota Denpasar dan diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampaui. Harapan ini dimungkinkan terealisasi, jikalau terwujud kondisi Kota Denpasar aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas masyarakat Kota Denpasar berjalan baik dan lancar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMD Kota Denpasar memberikan informasi mengenai kinerja DPMD Kota Denpasar yang memuat antara lain pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Hasil analisis pencapaian kinerja setiap tahunnya sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Denpasar yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum DPMD Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Adapun hasil analisis pencapaian kinerja pada DPMD Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja PelayananDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Desa Membangun			√	0.73	0.76	0.84	0.877	0.8900	0.73	0.76	0.84	0.877	0.9	100%	100%	100%	100%	101%
2	Presentase Desa yang administrasinya baik			√	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan			√	1500	2000	2500	3000	3500	1500	2000	2500	3000	3500	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Desa yang mampu meningkatkan perkembangannya sesuai dengan potensinya			√	5	10	15	20	27	5	10	15	20	27	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Usaha Ekonomi Desa/ Masyarakat yang berkembang			√	39	44	49	54	61	39	44	49	-	59	100%	100%	100%	-	97%

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2017-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata- Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG														
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.067.303.800	5.362.799.200	5.506.349.000	7.074.507.033	3.542.873.718	5.145.892.072	5.163.475.101	4.659.609.825	87%	96%	94%	66%	0,15	0,07
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.184.553.800	2.158.249.200	2.237.559.000	2.339.407.033	2.057.054.718	2.118.389.872	2.165.798.001	2.013.390.598	94%	98%	97%	86%	0,02	(0,01)
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.882.750.000	3.204.550.000	3.268.790.000	4.735.100.000	1.485.819.000	3.027.502.200	2.997.677.100	2.646.219.227	79%	94%	92%	56%	0,26	0,16
5.2.	BELANJA LANGSUNG														
1.02.07.102.07.0101.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.314.456.100	1.584.946.317	1.811.060.135	1.647.050.919	1.125.570.590	1.510.061.960	1.748.922.519	1.708.787.381	86%	95%	97%	104%	0,06	0,11
1.02.07.102.07.0101.019.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.314.456.100	1.584.946.317	1.811.060.135	1.647.050.919	1.125.570.590	1.510.061.960	1.748.922.519	1.708.787.381	86%	95%	97%	104%	0,06	0,1
1.02.07.102.07.0102.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	577.530.000	583.600.000	618.900.000	481.140.000	519.342.265	513.585.920	508.512.600	407.891.100	90%	88%	82%	85%	(0,04)	(0,06)
1.02.07.102.07.0102.011.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	577.530.000	583.600.000	618.900.000	481.140.000	519.342.265	513.585.920	508.512.600	407.891.100	90%	88%	82%	85%	(0,04)	(0,06)
1.02.07.102.07.0105.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	96.000.000	112.000.000	-	38.225.500	72.090.000	87.305.600	-	87%	75%	78%	-	0,26	0,23
1.02.07.102.07.0105.004.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	96.000.000	112.000.000	-	38.225.500	72.090.000	87.305.600,00	-	87%	75%	78%	-	0,26	0,23
1.01.02.102.07.0120.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	385.735.000	-	-	-	382.252.750	-	-	-	99%	-	-	-	(1,00)	(1,00)

1.01.02.1 .02.07.01 .20.002.	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	385.735 .000	-	-	-	382.25 2.750	-	-	-	99%	-	-	-	(1,00)	(1,00)
1.01.06.1 .02.07.01 .15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.01.06.1 .02.07.01 .15.007.	Pemberdayaan Potensi RTM (Pelatihan Kewirausahaan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.01.06.1 .02.07.01 .22.	Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.01.06.1 .02.07.01 .22.01.	Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02.03.1 .02.07.01 .15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02.03.1 .02.07.01 .15.032.	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02.07.1 .02.07.01 .16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	663.358 .500	141.852 .705	320.01 2.950	-	615.71 7.000	140.83 9.555	312.44 1.630	-	93%	99%	98%	-	(0,17)	(0,16)
1.02.07.1 .02.07.01 .16.006.	Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	351.863 .750	-	248.81 1.250	-	348.50 9.450	242.29 8.220	-	99%	-	97%	-	-	(0,08)	(0,09)

1.02.07.1 .02.07.01 .16.007.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	49.197. 500	105.307 .850	32.233. 350		48.488. 500	105.19 4.700	32.197. 330		99%	100%	100%	-	(0,10)	(0,10)
1.02.07.1 .02.07.01 .16.008.	Sosialisasi Pembentukan BUMDES Kota Denpasar Tahun 2017	27.804. 250	-	-	-	15.979. 500	-	-	-	57%			-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .16.009.	Pemberdayaan Bagi Pedagang dan Pengelola Pasar Tradisional	234.493 .000	-	-	-	202.73 9.550	-	-	-	86%			-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .16.11.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES	-	36.544. 855	-	-	-	35.644. 855,00	-	-		98%		-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .16.002	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	-	-	38.968. 350	-	-	-	37.946. 080	-	-	-	97%	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	653.263 .450	785.389 .960	756.75 1.325	1.428.6 68.700	562.07 1.850	773.29 0.085	639.30 9.100	1.365.4 86.281	86%	98%	84%	96%	0,22	0,25
1.02.07.1 .02.07.01 .17.005.	Penyusunan Profil Kelurahan	116.540 .000	60.042. 500	-	-	65.967. 600	55.547. 050	-	-	57%	93%	-	-	(0,15)	(0,04)
1.02.07.1 .02.07.01 .17.006.	Lomba Kelurahan	303.122 450	-	-	-	290.85 2.800	-	-	-	96%	-	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .17.007.	Bulan Bhakti Gotong Royong	42.343. 400	21.364. 850	-	1.402.5 46.200	33.526. 400	21.250. 350	-	1.344.7 33.081	79%	99%	-	96%	2,21	1,52
1.02.07.1 .02.07.01 .17.008.	Pembinaan Desa/Kelurahan Berkembang	191.257 .600	173.701 .000	128.43 8.400	-	171.72 5.050	169.32 1.950	124.37 7.600	-	90%	97%	97%	-	(0,09)	(0,08)
1.02.07.1 .02.07.01 .17.001.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	-	94.296. 350	190.65 1.100	-	-	92.610. 500	105.11 9.200	-	-	98%	55%	-	0,19	0,03
1.02.07.1 .02.07.01 .17.010.	Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	-	420.329 .985	341.80 3.235	26.122. 500	-	419.28 3.935	328.09 6.050	20.753. 200	-	100%	96%	79%	(0,50)	(0,53)

1.02.07.1 .02.07.01 .17.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kerjasama Antar Desa	-	15.655.275	11.410.990	-	-	15.276.300	10.886.250	-	-	98%	95%	-	(0,08)	(0,08)	
1.02.07.1 .02.07.01 .17.013.	Penyusunan Profil Kelurahan Desa/Kelurahan	-	-	39.389.900	-	-	-	35.994.300	-	-	-	91%	-	(1,00)	(1,00)	
1.02.07.1 .02.07.01 .17.015.	Pendataan Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang	-	-	28.034.500	-	-	-	25.779.500	-	-	-	92%	-	(1,00)	(1,00)	
1.02.07.1 .02.07.01 .17.016.	Pemberdayaan Desa dalam Rangka Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan	-	-	17.023.200	-	-	-	9.056.200	-	-	-	53%	-	(1,00)	(1,00)	
1.02.07.1 .02.07.01 .18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	999.123.850	745.674.935	1.411.201.655	191.088.685	537.038.150	730.563.211	1.177.213.720	112.352.290		54%	98%	83%	59%	(0,34)	(0,32)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.005.	Verifikasi Ranperdes APBDes	54.776.800	53.180.665	-	-	20.092.800	51.614.753	-	-	37%	97%	-	-	(0,01)	0,27	
1.02.07.1 .02.07.01 .18.006.	Penilaian Inovasi Pemerintah Desa	262.595.000	328.238.300	-	-	241.371.000	326.476.850	-	-	92%	99%	-	-	0,06	0,08	
1.02.07.1 .02.07.01 .18.007.	Pembinaan/Fasilitasi dan Monitoring Pengembangan Keswadayaan Masyarakat	90.620.000	-	-	-	90.471.500	-	-	-	100%	-	-	-	(1,00)	(1,00)	
1.02.07.1 .02.07.01 .18.008.	Monitoring Pelaksanaan APBDes	61.079.800	-	-	-	24.789.700	-	-	-	41%	-	-	-	(1,00)	(1,00)	
1.02.07.1 .02.07.01 .18.009.	Sosialisasi Permendagri tentang Kewenangan Desa	14.296.500	-	-	-	9.317.450	-	-	-	65%	-	-	-	(1,00)	(1,00)	

1.02.07.1 .02.07.01 .18.010.	Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa Tentang Administrasi Desa	136.594 .650	-	-	-	30.820. 050	-	-	-	23%	-	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.011.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Kerjasama Lembaga Antar Desa	108.426 .200	-	-	-	62.139. 200	-	-	-	57%	-	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.012.	Bimbingan Teknis Siskeudes bagi Bendahara Desa, Tenaga Admin dan Operator Desa	146.655 .800	-	-	-	57.010. 050	-	-	-	39%	-	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.013.	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan APBDes	124.079 .100	-	-	-	1.026.4 00	-	-	-	1%	-	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.012.	Pembinaan Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	-	10.345. 900	-	-	-	10.296. 900	-	-	-	100%	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.013.	Pendataan Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang	-	32.180. 300	-	-	-	31.880. 300	-	-	-	99%	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.018	Monitoring Pelaksanaan APBDes	-	49.123. 110	-	-	-	47.638. 708	-	-	-	97%	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.019.	Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan APBDes	-	93.152. 535	59.363. 435	-	-	89.910. 360	55.842. 900	-	-	97%	94%	-	(0,11)	(0,11)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.22.	Sosialisasi Permendagri No. 20 Tahun 2018, Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	-	39.382. 975	-	-	-	37.313. 290	-	-	-	95%	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.23.	Forum Diskusi Group (FDG) penyerahan kewenangan desa	-	125.071 .300	-	-	-	120.93 5.700	-	-	-	97%	-	-	(1,00)	(1,00)

1.02.07.1 .02.07.01 .18.24.	Bintek Peningkatan Kapasitas lembaga dan Perangkat Desa	-	14.999.850	-	-	-	14.496.350	-	-	-	97%	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.005.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	-	-	35.351.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.023.	Pengukuhan BPD	-	-	274.872.500	-	-	-	225.595.300	-	-	-	82%	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.024.	Pemilihan Kepala Desa	-	-	761.639.000	-	-	-	661.019.700	-	-	-	87%	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.026.	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	28.927.332	-	-	-	28.130.570	-	-	-	97%	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.027.	Bimbingan Teknis Siskeudes Bagi Kaur Keuangan, Tenaga Admin dan Operator Siskeudes	-	-	106.564.408	-	-	-	96.494.750	-	-	-	91%	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.28.	Bimbingan Teknis Bagi Tim Evaluasi APBDes	-	-	21.336.040	-	-	-	17.893.500	-	-	-	84%	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.29.	Bimbingan Teknis bagi Ketua BPD, dan Staf BPD se-Kota Denpasar	-	-	123.147.000	-	-	-	92.237.000	-	-	-	75%	-	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.009.	Bimtek Prerbekel dan BPD se-Kota Denpasar	-	-	-	107.886.000	-	-	-	69.432.400	-	-	-	64%	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .18.030.	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan APBDes	-	-	-	83.202.685	-	-	-	42.919.890	-	-	-	52%	(1,00)	(1,00)
1.02.07.1 .02.07.01 .19.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	5.392.003.000	5.212.518.190	3.245.505.520	1.092.163.990	4.921.553.109	4.905.928.990	3.063.265.014	1.039.367.850	91%	94%	94%	95%	(0,33)	(0,32)
1.02.07.1 .02.07.01 .19.004.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	5.300.163.300	5.212.518.190	3.225.307.320	998.783.990	4.830.701.109	4.905.928.990	3.043.083.814	979.246.100	91%	94%	94%	98%	(0,34)	(0,33)

1.02.07.1 .02.07.01 .19.006.	Peningkatan Peran Pokjanaldan Pokja Posyandu	91.839. 700	-	20.198. 200	-	90.852. 000	-	20.181. 200	-	99%	-	100%	-	(0,32)	(0,31)
2.00.03.1 .02.07.01 .16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.03.1 .02.07.01 .16.003.	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.1 .02.07.01 .19.007.	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PKK Kota Denpasar	-	-	-	93.380. 000	-	-	60.121. 750	-	-	-	64%	(1,00)	(1,00)	
1.02.07.1 .02.07.01 .15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.07.1 .02.07.01 .15.004.	Pemberdayaan Desa dalam Rangka Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
	Belanja Daerah DPMD Kota Denpasar	10,229,226,417	9,137,094,801	89%
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1,566,242,070	1,535,404,750	98%
	Peningkatan Kualitas Kelurga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,566,242,070	1,535,404,750	98%
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1,566,242,070	1,535,404,750	98%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,347,834,212	7,318,878,151	88%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,764,756,670	4,870,565,264	84%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,761,756,670	4,867,565,264	84%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,000,000	3,000,000	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214,428,070	201,982,156	94%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,660,440	4,660,440	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133,594,630	121,748,716	91%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39,753,000	39,153,000	98%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36,420,000	36,420,000	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,000,000	16,000,000	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	16,000,000	16,000,000	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,068,324,472	1,960,565,331	95%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130,200,000	62,242,959	48%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,938,124,472	1,898,322,372	98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284,325,000	269,765,400	95%
	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220,125,000	206,055,400	94%
	Pemeliharaan Mebel	5,200,000	5,200,000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,500,000	39,110,000	99%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,500,000	19,400,000	99%
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	132,732,575	123,694,600	93%
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	132,732,575	123,694,600	93%
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	132,732,575	123,694,600	93%
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	182,417,560	159,117,300	87%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	182,417,560	159,117,300	87%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	80,888,800	64,146,200	79%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	77,900,400	72,261,700	93%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	23,628,360	22,709,400	96%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk lebih memperkuat strategi DPMD Kota Denpasar dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Berikut analisis SWOT DPMD Kota Denpasar:

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- a) Adanya Peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai landasan kegiatan organisasi;
- b) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMD Kota Denpasar;
- c) Dukungan dan komitmen dari masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a) Kualiatas SDM yang belum merata dan memadai;
- b) Dana Operasional relatif terbatas;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a) Adanya kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kemampuan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- b) Adanya Inovasi dan Potensi-Potensi Desa;

4. Ancaman /tantangan (*Threats*)

- a) Adanya pandemic covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat
- b) Informasi yang terlambat akan perubahan-perubahan aturan pada aparatur Desa;
- c) Masyarakat yang pasif dalam berpartisipasi pada pembangunan.

Melihat faktor – faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT diatas, maka dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi DPMD Kota Denpasar diantaranya: mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan/perluasan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan terutama pasca terjadinya pandemic covid-19; perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pemberdayaan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian;serta partisipasi masyarakat yang masih pasif dalam pembangunan desa.

Selain tantangan terdapat peluang DPMD Kota Denpasardalam pencapaian Visi dan Misi yaitu sebagai berikut :adanya komunikasi maupun kerjasama yang baik antara DPMD dan Desa sehingga pembinaan dan pendampingan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta adanya inovasi dan potensi desa yang dapat dikembangkan menuju Desa Mandiri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERAGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD Kota Denpasar

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan langsung dari bawah (*bottom up*) melalui peningkatan kapasitas yang dilakukan baik secara swadaya murni masyarakat maupun ada stimulant atau rangsangan dari pemerintah daerah hingga *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, terdapat beberapa permasalahan yang muncul seperti :

1. Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan masyarakat
2. Belum maksimalnya kapasitas yang mendukung kemandirian masyarakat
3. Belum berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan
4. Belum optimalnya tingkat keswadayaan dan kemandirian masyarakat desa
5. Belum maksimalnya pelayanan pemerintah desa
6. Terdapat Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perbekel Baru yang belum dilatih

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Stragegis DPMD Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyasiasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

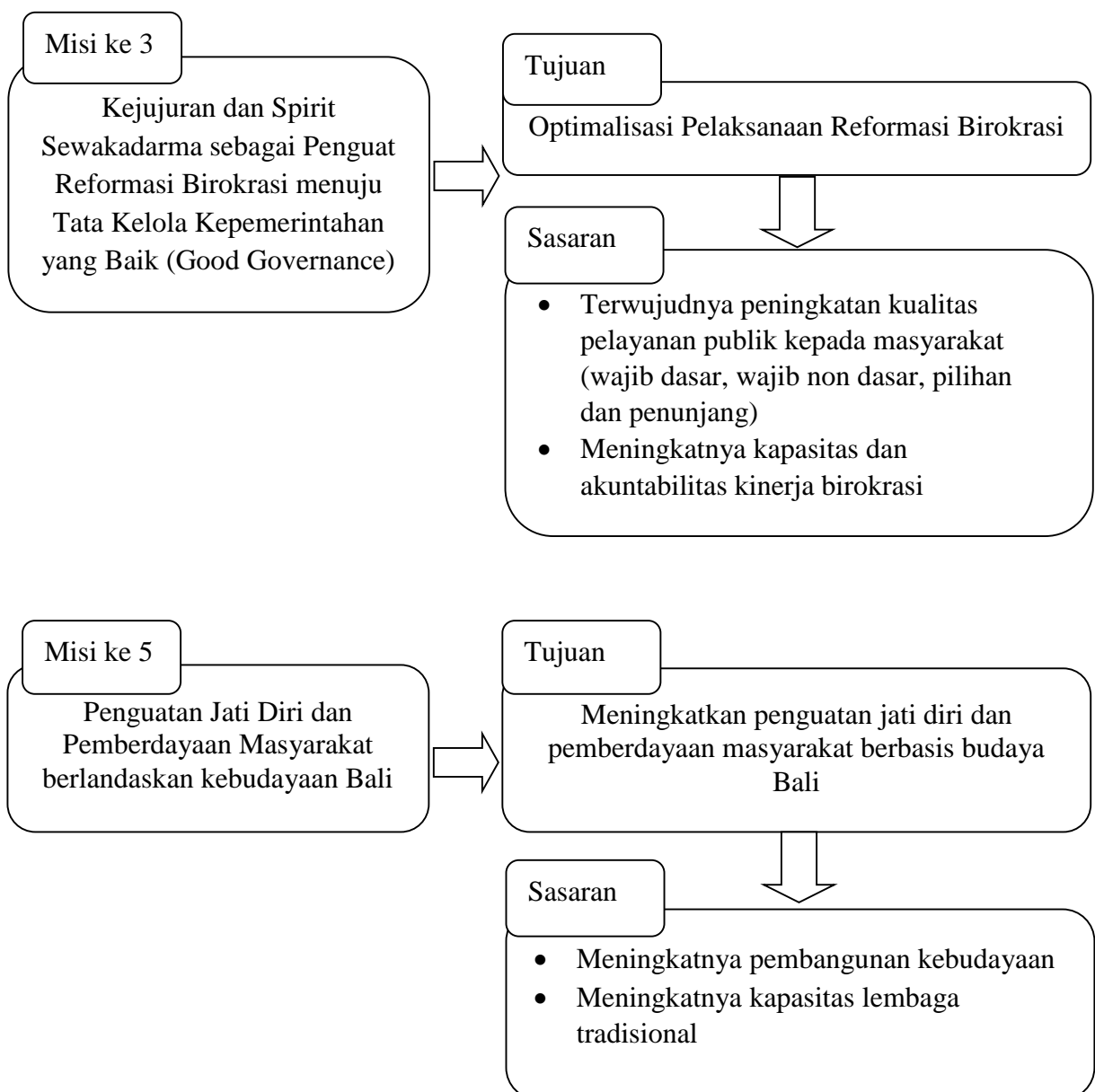
Secara singkat disampaikan Visi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”** dengan didukung lima Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan keMAKMURan masyarakat kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga Stabilitas keAMANan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana
3. KeJUJURan dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat REFORMASI BIROKRASI menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. UNGGUL dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan keBUDAYAan Bali

Mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar maka DPMD Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam Renstra DPMD Kota Denpasar tahun 2021-2026, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar melalui program-program yang dijalankan oleh DPMD Kota Denpasar. Keselarasan Visi dan Misi serta Padmasara Kota Denpasar dengan Program yang ada pada DPMD Kota Denpasar. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Stragegis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar maka dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2021-2026, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar melalui program-program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Adapun Misi, tujuan dan sasaran yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dijabarkan sebagai berikut:



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dapat mencapai Visi pembangunan Indonesia adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Dengan Misi yang terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, yaitu:

A. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM)

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

B. Pembangunan infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

C. Penyederhanaan regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, dan Kedua UU Pemberdayaan UMKM

D. Penyederhanaan birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur, dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi

E. Transformasi ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk 16 Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”. Pengertian dari visi tersebut adalah :

- a) Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- b) Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing
- c) Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional
- d) Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut: 1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; 2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan; 3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal; 4. Menyelenggarakan transmigrasi; 5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan 7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan;
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul;
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

3.3.2. Telaahan Renstra K/L

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Visi:

”Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Provinsi Bali berkontribusi secara langsung terhadap misi Pemerintah Provinsi Bali pada misi nomor 16 dan 22 yaitu sebagai berikut :

- a) Misi ke-16: Membangun dan Mengembangkan Pusat-PusatPerekonomian Baru sesuai dengan Potensi Kab/Kota di Balidengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk MendukungPertumbuhan Ekonomi dalam Arti Luas,
- b) Misi ke-22: Mengembangkan Sistem Tata Kelola PemerintahanDaerah yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel danBersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat,Pasti dan Murah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Perda No 27 tahun 2011 Tentang RTRW kota Denpasar dimana disebutkan bahwa rencana struktur ruang kota adalah rencana pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana kota yang dapat memberikan gambaran arahan struktur ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang berhirarki dan memiliki hubungan fungsional. Dimana Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup strategis Kota Denpasar, dengan ekosistemnya lebih banyak daerah terbangun dibandingkan dengan yang masih hijau dan bervegetasi. Luas areal jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kategori sangat tinggi hanya mencapai luasan 225,16 Ha yang kalau dibandingkan dengan luas keseluruhan jasa ekosistem penyedia air bersih Provinsi Bali, hanya mencapai 0,04 %. Penyedia air bersih dengan kategori tinggi, arealnya lebih luas yaitu 1.690 Ha atau 0.31 % dari luas yang dimiliki Provinsi Bali. Luasan kategori sedang mencapai 264,27 Ha (0,05 %). Untuk kategori rendah angkanya jauh lebih tinggi yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2025 II - 19 mencapai 9.779,94 Ha atau 1,77 %. Sedangkan jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kategori sangat rendah, paling sedikit yaitu 149,44 Ha atau 0,03 % saja.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Kota Denpasar. Isu Strategis yang menghambat pengembangan Visi dan Misi Kota Denpasar dan yang didukung tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kota Denpasar

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu suatu hasil akhir/ target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Penetapan target-target yang ingin dicapai oleh DPMD Kota Denpasar bersifat kualitatif dan kuantitatif dimana capaian hasil akhir/ target merupakan ukuran keberhasilan yang didasarkan pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, DPMD Kota Denpasar menetapkan tujuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. DPMD Kota Denpasar menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

SEBELUM PERUBAHAN								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun	0.910	0.940	0.960	0.980	1
SETELAH PERUBAHAN								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	0.910	0.940	0.960	0.980	1
			Indeks Profil Desa	0,760	0,760	0,770	0,770	0,770

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Strategi DPMD Kota Denpasar

Untuk mencapai tujuan dan sebagai penjabaran atas sasaran, strategi yang akan ditempuh adalah melalui pola integrasi implementasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kota Denpasar. Adapun strategi yang digunakan DPMD Kota Denpasar ialah:

- a) Meningkatkan pembinaan aparatur desa dan pendampingan administrasi pada pemerintahan desa
- b) Meningkatkan pembinaan pada lembaga usaha ekonomi desa
- c) Meningkatkan pembinaan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan desa

5.2 Arah Kebijakan DPMD Kota Denpasar

Kebijakan adalah keputusan politik pemerintah untuk mengarahkan *stakeholders* dalam kerangka pelaksanaan program pemerintah. Berpijak kepada urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara umum yang menjadi arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah “menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai pintu masuk agar mampu menyelesaikan masalah–masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab masyarakat yang mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat” yang dilaksanakan dalam lima tahun kedepan. Arah kebijakan tersebut diuraikan kedalam tiga Bidang sesuai substantif Tugas Pokok dan Fungsi struktur organisasi DPMD Kota Denpasar, secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan “Meningkatkan pembinaan aparatur desa dan pendampingan administrasi pada pemerintahan desa”

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tata kelola dan infrastruktur yang lebih baik. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur pemerintah desa melalui pembinaan dan monitoring.

2. Arah kebijakan “Meningkatkan pembinaan pada lembaga usaha ekonomi desa”
Peningkatan daya saing usaha ekonomi desa melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek – aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola/masyarakat.
3. Arah kebijakan “Meningkatkan pembinaan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan desa”
Peningkatan partisipasi masyarakat melalui peningkatan peran serta lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa. Membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan pembangunan.

Visi : KOTA KRETIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU

Misi :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali

Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju MISI : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Meningkatkan pembinaan aparatur desa dan pendampingan administrasi pada pemerintahan desa	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tata kelola dan infrastruktur yang lebih baik. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur pemerintah desa melalui pembinaan dan monitoring.
		Meningkatkan pembinaan pada lembaga usaha ekonomi desa	Peningkatan daya saing usaha ekonomi desa melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek – aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola/masyarakat
VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju MISI : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Meningkatkan pembinaan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan desa	Masuk kedalam dimensi ekspresi budaya dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan maka dilakukannya peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi peran serta lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa. Membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sejalan dengan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 *Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju* maka program/kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar 2021-2026 antara lain Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yang semuanya bermuara untuk meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, lebih banyak memberikan fasilitasi terhadap kelancaran pelayanan operasional pemerintah desa. Upaya menggalang swadaya masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan juga menjadi sebagian tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Untuk dapat melaksanakan tugasnya ini beberapa program akan dijalankan tertera dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Kemandirian Desa	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	9,034,016,912
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5,729,097,208
			Sub Kegiatan :				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	5,726,097,208
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	257,820,232
			Sub Kegiatan :				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1 Paket	1 Paket	5,069,160
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	10 Paket	10 Paket	177,010,572
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.	1 Paket	1 Paket	40,520,500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	4 Dokumen	4 Dokumen	35,220,000
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	509,100,000
			Sub Kegiatan :				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	400,650,000
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	5,200,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	76,750,000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	26,500,000
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	135,200,000
			Sub Kegiatan :				
			Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	64 Unit	135,200,000
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2,402,799,472

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8
			Sub Kegiatan :				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	113,400,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,289,399,472
			Program : Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	867,742,785
			Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	27 Desa	27 Desa	827,742,785
				Jumlah Bumdes yang aktif	27 Bumdes	27 Bumdes	40,000,000
			Sub Kegiatan :				
			Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	39,650,000
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	54 Orang		
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	27 Laporan	4 Laporan	308,092,785
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	43 Dokumen	43 Dokumen	50,000,000
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	80,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	10 Dokumen	350,000,000
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000
			Program : Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama yang terbentuk	28	30	57,000,000
			Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama	n/a	27	57,000,000
			Sub Kegiatan :				
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	15,000,000
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	42,000,000
			Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	n/a	100%	3,284,000,000
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	n/a	27 LKD	3,139,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8
				Jumlah Pasar Desa dengan fasilitas yang baik	12 Pasar	14 Pasar	145,000,000
			Sub Kegiatan :				
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	32,000,000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Lembaga	27 Lembaga	75,000,000
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	32,000,000
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000
			Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000

Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Kualitas Kemandirian Desa	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan		Program : Penunjang Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pemenuhan Layanan Keseekretariatan	100%	100%	9,034,016,912	100%	9,957,618,603	100%	10,971,560,464	100%	12,084,876,510	100%	13,388,304,160	100%	13,388,304,160
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5,729,097,208	100%	6,302,006,929	100%	6,932,207,622	100%	7,625,428,384	100%	8,387,971,222	100%	8,387,971,222
			Sub Kegiatan :														
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	5,726,097,208	38 Orang/Bulan	6,298,706,929	38 Orang/Bulan	6,928,577,622	38 Orang/Bulan	7,621,435,384	38 Orang/Bulan	8,383,578,922	38 Orang/Bulan	8,383,578,922
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,300,000	1 Dokumen	3,630,000	1 Dokumen	3,993,000	1 Dokumen	4,392,300	1 Dokumen	4,392,300

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	257,820,232	100%	303,802,255	100%	352,362,481	100%	403,758,729	100%	539,074,601	100%	539,074,601
			Sub Kegiatan :														
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1 Paket	1 Paket	5,069,160	1 Paket	5,576,076	1 Paket	6,133,684	1 Paket	6,747,052	1 Paket	7,421,757	1 Paket	7,421,757
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	10 Paket	10 Paket	177,010,572	10 Paket	194,711,629	10 Paket	214,182,792	10 Paket	235,601,071	10 Paket	259,161,178	10 Paket	259,161,178
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.	1 Paket	1 Paket	40,520,500	1 Paket	44,572,550	1 Paket	49,029,805	1 Paket	53,932,786	1 Paket	59,326,064	1 Paket	59,326,064
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	4 Dokumen	4 Dokumen	35,220,000	5 Dokumen	38,742,000	5 Dokumen	42,616,200	5 Dokumen	46,877,820	5 Dokumen	51,565,602	5 Dokumen	51,565,602

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	20,200,000	1 Laporan	40,400,000	1 Laporan	60,600,000	1 Laporan	161,600,000	1 Laporan	161,600,000
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	509,100,000	100%	560,010,000	100%	616,011,000	100%	677,612,100	100%	745,373,310	100%	745,373,310
			Sub Kegiatan :														
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	400,650,000	24 Unit	440,715,000	24 Unit	484,786,500	24 Unit	533,265,150	24 Unit	586,591,665	24 Unit	586,591,665
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	5,200,000	20 Unit	5,720,000	20 Unit	6,292,000	20 Unit	6,921,200	20 Unit	7,613,320	20 Unit	7,613,320
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	76,750,000	85 Unit	84,425,000	85 Unit	92,867,500	85 Unit	102,154,250	85 Unit	112,369,675	85 Unit	112,369,675

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	26,500,000	1 Unit	29,150,000	1 Unit	32,065,000	1 Unit	35,271,500	1 Unit	38,798,650	1 Unit	38,798,650
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	135,200,000	100%	148,720,000	100%	163,592,000	100%	179,951,200	100%	197,946,320	100%	197,946,320
			Sub Kegiatan :														
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	64 Unit	135,200,000	64 Unit	148,720,000	64 Unit	163,592,000	64 Unit	179,951,200	64 Unit	197,946,320	64 Unit	197,946,320
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2,402,799,472	100%	2,643,079,419	100%	2,907,387,361	100%	3,198,126,097	100%	3,517,938,707	100%	3,517,938,707
			Sub Kegiatan :														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	113,400,000	12 Laporan	124,740,000	12 Laporan	137,214,000	12 Laporan	150,935,400	12 Laporan	166,028,940	12 Laporan	166,028,940
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,289,399,472	12 Laporan	2,518,339,419	12 Laporan	2,770,173,361	12 Laporan	3,047,190,697	12 Laporan	3,351,909,767	12 Laporan	3,351,909,767
			Program : Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	867,742,785	100%	790,615,000	100%	1,044,676,500	100%	2,256,644,150	100%	1,052,308,565	100%	1,052,308,565
			Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Desa	27 Desa	827,742,785	27 Desa	746,615,000	27 Desa	996,276,500	27 Desa	2,203,404,150	27 Desa	993,744,565	27 Desa	993,744,565
			Sub Kegiatan : Jumlah Bumdes Desa yang aktif	Jumlah Bumdes yang aktif	27 Bumdes	27 Bumdes	40,000,000	27 Bumdes	44,000,000	27 Bumdes	48,400,000	27 Bumdes	53,240,000	27 Bumdes	58,564,000	27 Bumdes	58,564,000
			Sub Kegiatan :														
			Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen			27 Dokumen	175,000,000	27 Dokumen	192,500,000	27 Dokumen	211,750,000	27 Dokumen	232,925,000	27 Dokumen	232,925,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	39,650,000	27 Dokumen	43,615,000	27 Dokumen	47,976,500	27 Dokumen	52,774,150	27 Dokumen	58,051,565	27 Dokumen	58,051,565
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	54 Orang					54 Orang	175,000,000						
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	27 Laporan	4 Laporan	308,092,785					23 Laporan	1,300,000,000				
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	43 Dokumen	43 Dokumen	50,000,000	43 Dokumen	55,000,000	43 Dokumen	60,500,000	43 Dokumen	66,550,000	43 Dokumen	73,205,000	43 Dokumen	73,205,000
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	80,000,000	27 Dokumen	88,000,000	27 Dokumen	96,800,000	27 Dokumen	106,480,000	27 Dokumen	117,128,000	27 Dokumen	117,128,000
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	10 Dokumen	350,000,000	10 Dokumen	385,000,000	10 Dokumen	423,500,000	10 Dokumen	465,850,000	10 Dokumen	512,435,000	10 Dokumen	512,435,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	44,000,000	1 Dokumen	48,400,000	1 Dokumen	53,240,000	1 Dokumen	58,564,000	1 Dokumen	58,564,000
			Program : Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama yang terbentuk	28	30	57,000,000	32	62,700,000	34	68,970,000	36	75,867,000	38	83,453,700	38	83,453,700
			Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama	n/a	27	57,000,000	27	62,700,000	27	68,970,000	27	75,867,000	27	83,453,700	27	83,453,700
			Sub Kegiatan :														
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	18,150,000	1 Dokumen	19,965,000	1 Dokumen	21,961,500	1 Dokumen	21,961,500
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	42,000,000	1 Dokumen	46,200,000	1 Dokumen	50,820,000	1 Dokumen	55,902,000	1 Dokumen	61,492,200	1 Dokumen	61,492,200

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	100%	100%	3,284,000,000	100%	3,542,400,000	100%	3,596,640,000	100%	3,656,304,000	100%	3,721,934,400	100%	3,721,934,400
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	n/a	27 LKD	3,139,000,000	27 LKD	3,382,900,000	27 LKD	3,421,190,000	27 LKD	3,463,309,000	27 LKD	3,509,639,900	27 LKD	3,509,639,900
				Jumlah Pasar Desa dengan fasilitas yang baik	12 Pasar	14 Pasar	145,000,000	15 Pasar	159,500,000	16 Pasar	175,450,000	17 Pasar	192,995,000	18 Pasar	212,294,500	18 Pasar	212,294,500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan :														
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	32,000,000	2 Dokumen	265,200,000	2 Dokumen	291,720,000	2 Dokumen	320,892,000	2 Dokumen	352,981,200	2 Dokumen	352,981,200
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27 Lembaga	27 Lembaga	75,000,000	27 Lembaga	82,500,000	27 Lembaga	90,750,000	27 Lembaga	99,825,000	27 Lembaga	109,807,500	27 Lembaga	109,807,500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	32,000,000	1 Laporan	35,200,000	1 Laporan	38,720,000	1 Laporan	42,592,000	1 Laporan	46,851,200	1 Laporan	46,851,200
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000,000	1 Dokumen	3,000,000,000	1 Dokumen	3,000,000,000	1 Dokumen	3,000,000,000	1 Dokumen	3,000,000,000	1 Dokumen	3,000,000,000
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000	1 Dokumen	115,500,000	1 Dokumen	127,050,000	1 Dokumen	139,755,000	1 Dokumen	153,730,500	1 Dokumen	153,730,500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	44,000,000	1 Laporan	48,400,000	1 Laporan	53,240,000	1 Laporan	58,564,000	1 Laporan	58,564,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja DPMD Kota Denpasar

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan. Sejalan dengan perubahan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dimana salah satu dari sepuluh prinsip *good govenance* adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan program kebijakan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Renstra tingkat keberhasilan yang dicapai hendaknya dapat diukur, sehingga dengan demikian terjadi hubungan sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini tercermin dalam tingkat keberhasilannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu disajikan dokumen Rencana Strategis yang merupakan rencana lima tahunan. Untuk mengukur Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Renstra unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Sebelum pengukuran kinerja dilakukan beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang dikoordinasi, indikator kinerja yang dimaksud (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis, maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator telah disebutkan seperti uraian diatas. Sedangkan pengumpulan data kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efektif dan efisien. Pengumpulan data untuk indikator masukan, keluaran dan hasil secara sistematis serta mudah diperoleh, guna mendapatkan data kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,877	0.910	0.940	0.960	0.980	1	1
2.	Indeks Profil Desa	Nilai	0,760	0,760	0,760	0,770	0,770	0,770	0,770

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN								
1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	2	2	2
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	1	1	1	1	2	2	2
4.	Presentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Presentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	4	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5
7.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,877	0,910	0,940	0,960	0,980	1	1

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2021-2026 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMD 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasara dan Strategi dalam mencapai tujuan yang dijabarkan ke dalam kebijakan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan Tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh adanya kontribusi dan sinkronisasi dari seluruh *stakeholders* secara harmoni di semua tingkatan, mulai dari konsistensi indikator kinerja utama, RPJMD, Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi ini, kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja tahunan. Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja hingga penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Akhirnya rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran, pelaporan dan pengendalian untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Denpasar, 16 September 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Denpasar

